



Surabaya (BM) - Komisi D DPRD mendapatkan data mengejutkan. Sekitar 400 ribu warga Surabaya ternyata belum memiliki KTP elektronik (e-KTP). Wakil Ketua Komisi yang membidangi kesejahteraan dan pendidikan itu, Edi Budi Prabowo, menduga, trobosan yang dibuat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) tidak tepat sasaran. "Jangan berpangku tangan, sebaiknya Pemkot jemput bola," katanya, Rabu (21/8). Padahal mengacu kota-kota di seputar Surabaya, pelaksanaan e-KTP berjalan lancar atau seperti halnya di Sidoarjo, Mojokerto dan Gresik. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah setempat menggandeng pengurus RT/RW untuk diajak mensukseskan program ini. "Hasilnya sangat bagus dan pelaksanaan e-KTP hampir selesai. Pertanyaannya, kenapa di Surabaya tidak bisa seperti itu," terang politisi dari Partai Golkar tersebut. Edi memberikan contoh khusus warga Surabaya di dalam tahanan, sebaiknya harus diadakan jemput bola dengan mendatangi rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan (lapas). Ia mengkritik mobil e-KTP milik Dispendukcapil selama ini pasif karena hanya dipajang di pinggir jalan dan menunggu warga yang datang mengurus e-KTP. "Lebih baiknya mobil itu difungsikan mendatangi tempat-tempat tertentu seperti halnya rumah tahanan," katanya.

Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Suharto Wardoyo sebelumnya mengatakan pihaknya sudah melakukan perekaman data terhadap warga Surabaya yang sedang menjalani proses hukum dan kini meringkuk di sel tahanan polisi atau lembaga permasyarakatan. "Kami sudah jemput bola dengan melakukan perekaman data bagi warga yang sampai saat ini belum memiliki e-KTP seperti di tahanan di Polres Tanjung Perak dan sekolah SMA di Surabaya," katanya.

Perekaman data ini dilakukan untuk mengejar target 1 Januari 2014, harapannya semua warga Surabaya sudah memiliki e-KTP sesuai yang diinginkan pemerintah pusat. Sedangkan saat ini masih banyak warga yang belum melakukan proses pendataan e-KTP. "Kami tetap upayakan agar pendataan e-KTP tetap dilakukan meski warga sedang berproses hukum. Karena untuk mendapat e-KTP merupakan hak setiap warga," kata Suharto Wardoyo.

Penyebaran e-KTP memang sangat penting saat ini. Selain menghadapi agenda Pilgub Jatim, 29 Agustus mendatang, Surabaya juga harus bersiap menghadapi ledakan jumlah penduduk ilegal yang jadi fenomena tersendiri tiap habis musim Lebaran. Terkait persoalan terkahir, Wali Kota Tri Rismaharini sebelumnya sudah memberikan warning akan menjatuhkan sanksi tegas. Denda Rp50 juta atau hukuman tiga bulan penjara terhadap pendatang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, tujuan yang jelas dan identitas Surabaya melalui operasi yustisi yang akan gencar dilakukan.

"Inshaallah bisa, operasi itu bukan hanya untuk pengaturan penduduk, tapi juga keamanan.

400 Ribu Warga Ber-KTP Lama

Ditulis oleh Dispendukcapil
Kamis, 06 Februari 2014 15:07 -

Untuk itu, Kipem kita kendalikan, jika tidak ada penjamin akan susah. Soal sanksi itu tipiring (Tindak Pidana Ringan) ditentukan lewat persidangan," ujarnya.

Risma mengakui, membanjirnya jumlah pendatang ke Surabaya, karena Kota Pahlawan ini diibaratkan gula, yang menyediakan berbagai peluang pekerjaan bagi para pendatang. Padahal menurut mantan kepala Bappeko Surabaya ini, justru pihaknya menciptakan gula atau berbagai lapangan kerja bagi warganya melalui pelatihan keahlian dan industri kreatif.

Berdasarkan data Dispendukcapil Surabaya tahun 2012, jumlah jumlah warga luar kota yang tinggal di Surabaya yang ditunjukkan melalui Kartu Identitas penduduk musiman dari data sekitar 12 ribu orang. Namun dari jumlah itu saat ini yang tengah mengurus perpanjangan sekitar 4 ribu orang. (at/epe)

Sumber : beritametro.co.id